

PENGUATAN KELEMBAGAAN DESA UNTUK MITIGASI BENCANA PUSO DAN BANJIR

¹Sudirah, ²Agus Susanto, ³Agus Santoso
¹²³Universitas Terbuka

Email: sudi@ecampus.ut.ac.id

Dalam pembangunan pedesaan analisis penguatan kelembagaan desa untuk mitigasi bencana puso dan banjir merupakan kajian yang menarik. Kajian dari perspektif sosiologi, dan penyuluhan pembangunan ini dilakukan di desa Kertawinangun, Soge, dan Ilir kabupaten Indramayu, Jawa Barat, tahun 2018. Pada umumnya musim tanam padi dilakukan pada musim *rendeng* dan *sadon*. Namun musim tanam padi di ketiga desa tersebut hanya dapat dilakukan pada musim *rendeng*. Itupun sering mengalami gagal panen (*puso*), akibat banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau. Untuk mengatasi gagal panen padi tersebut adalah membangun bendung Kali Perawan. Pembangunan bendung perlu penguatan kelembagaan desa. Penguatan kelembagaan desa dilakukan melalui partisipasi aktif masyarakat dalam lembaga-lembaga desa, seperti Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kerjasama antar desa, Perkumpulan Petani Pemakai Air, dan sebagainya agar dapat berperan semestinya, dan mampu meningkatkan kompetensinya. Metode penelitian ini adalah kualitatif. Pengumpulan data melalui observasi, dokumen, dan wawancara terhadap informan. Analisis data dilakukan dengan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan penguatan kelembagaan desa mampu merekatkan jaringan kerjasama antara lembaga-lembaga desa, dan masyarakat untuk mendorong terwujudnya pembangunan bendung karet Kali Perawan. Penguatan kelembagaan desa mampu mengatasi mitigasi bencana puso dan banjir, dengan membangun bendung Karet Kali Perawan, membangun saluran irigasi ke lokasi persawahan petani, dan meningkatkan penganeekaragaman usaha pertanian dengan menanam palawija, usaha pertambakan ikan, dan usaha pembuatan garam. Akhirnya, penguatan kelembagaan desa untuk mitigasi bencana puso dan banjir mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani.

Kata kunci: kelembagaan desa, mitigasi bencana puso, *rendeng*, *sadon*, dan palawija.

PENDAHULUAN

Mitigasi Bencana puso merupakan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana puso (gagal panen). Penyebab bencana puso antara lain adalah bencana banjir dan kekeringan. Karena itu perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana banjir oleh masyarakat, lembaga-lembaga desa, dan instansi yang terkait secara bersinergi. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pembangunan fisik bendung air sungai, penyadaran kepada masyarakat akibat banjir, dan peningkatan kemampuan segenap lapisan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana (Pasal 1 ayat 6 PP No 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana). Daerah yang kerap mengalami bencana banjir adalah daerah yang dilalui aliran sungai. Di Kabupaten Indramayu salah satu sungai yang kerap menimbulkan banjir adalah Kali Perawan. Kali Perawan ini membentang dari hulu desa Drunten Wetan dan Drunten Kulon (Kecamatan Gabuswetan) ke hilir Desa Eretan wetan dan Eretan Kulon (Kecamatan Kandanghaur), melalui Desa Margamulya (Kecamatan Bongas), dan Desa Soge (Kecamatan Kandanghaur), berjarak sekitar 15 km. Lebar kali perawan sekitar 50 meter di daerah hulu dan 100 meter di daerah hilir. Dengan demikian, Kali Perawan melintasi 3 kecamatan, yaitu Gabuswetan, Bongas, dan Kandanghaur. Sekitar 85% penduduk di ketiga desa ini (Kertawinangun, Soge, dan Ilir) adalah petani padi sawah.

Pada musim hujan Kali Perawan kerap menimbulkan banjir, sebaliknya pada musim kemarau mengalami kekeringan. Akibat hal tersebut dapat menimbulkan gagal panen (*puso*) bagi para petani yang lahan pertaniannya berlokasi di daerah sekitar Kali Perawan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat petani maupun pemerintah daerah setempat untuk mengatasi bencana banjir. Penataan daerah aliran Kali Perawan dilakukan, seperti meluruskan Kali Perawan yang berliku-liku (normalisasi) agar aliran air tidak menggenang, bahkan Dinas Pengairan membuat larangan kepada warga masyarakat untuk tidak membuat gubuk-gubuk atau bangunan untuk berteduh di bantaran

sungai. Selain itu, penataan kali dilakukan dengan pengerukan pada bagian kali yang mengalami pendangkalan, agar dapat menampung debit air hujan lebih besar, serta melakukan penghijauan daerah hulu dengan tujuan untuk mencegah tanah longsor dan penyerapan air hujan lebih banyak. Semua itu dilakukan untuk mencegah timbulnya bencana banjir pada musim hujan.

Berbagai upaya mitigasi bencana banjir yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah daerah setempat dan instansi yang terkait lainnya. Sebelum dibangun bendung Kali Perawan, masyarakat petani kurang memanfaatkan air sungai untuk pertanian padi sawah yang berlokasi di daerah sekitar bantaran kali tersebut. Air Kali Perawan meluap di waktu musim hujan dan mengalami kekeringan di waktu musim kemarau. Akibat kekeringan Kali Perawan air laut masuk dari bagian hilir ke bagian hulu sungai tersebut. Bagian hilir Kali perawan bermuara di Desa Eretan Wetan dan Eretan Kulon pantai utara Jawa. Air laut yang asin tidak dapat dimanfaatkan untuk usaha pertanian padi sawah. Padi tidak dapat tumbuh subur bila kena air asin, akibatnya dapat menimbulkan gagal panen. Padahal petani memerlukan air tawar Kali Perawan tersebut untuk usaha pertanian, maupun usaha pertambakan secara berkesinambungan. Pembangunan Bendungan Karet Kali Perawan merupakan upaya dan perjuangan masyarakat yang bertahun-tahun, yang pada akhirnya dapat diwujudkan. Dengan terwujudnya pembangunan Bendungan Karet Kali Perawan ini masyarakat petani di ketiga desa ini mampu menanggulangi bencana banjir di waktu musim hujan dan kekeringan di waktu musim kemarau, terutama di daerah hilir kali Perawan. Pembangunan Bendungan Karet Kali Perawan dilengkapi dengan pembangunan saluran irigasi ke sawah-sawah petani di desa Kertawinangun, Soge dan Ilir.

Berdasarkan gambaran singkat di atas, yang ingin dijawab dalam paper ini adalah apakah penguatan kelembagaan desa berkontribusi terhadap mitigasi bencana puso dan banjir. Hal lain adalah apakah bendung Karet Kali Perawan tersebut mampu mengairi lahan sawah dan usaha pertanian lainnya bagi para petani di ketiga desa tersebut? Selanjutnya apakah intensifikasi, dan penganekaragaman usaha pertanian dapat dilakukan oleh para petani di ketiga desa tersebut?

TINJAUAN PUSTAKA

1. Penguatan Kelembagaan Desa

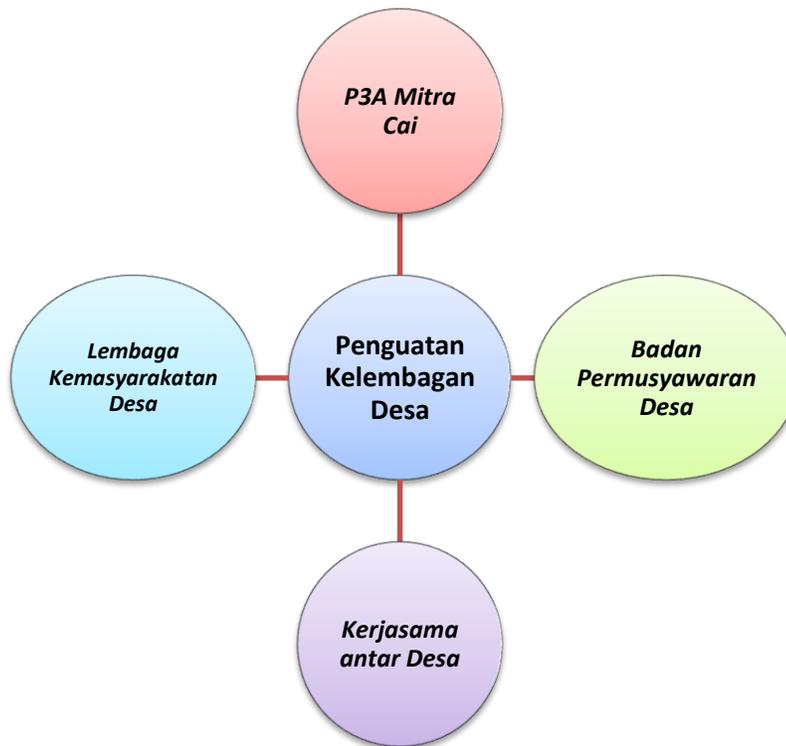
Dalam tulisan ini istilah lembaga sosial merupakan padanan dari lembaga kemasyarakatan, institusi sosial, dan pranata sosial. Soekanto (1986) menggunakan istilah lembaga kemasyarakatan untuk istilah tersebut. Paul B. Horton dan Chester L.Hunt (1999) mengemukakan lembaga sosial adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting, atau lembaga sosial adalah sistem hubungan sosial yang terorganisir yang mewujudkan nilai-nilai serta prosedur umum tertentu dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat.

Menurut Talcott Parsons (Ritzer, 2012) institusi sosial adalah *Adaptation, Goal attainment, Integration, Latent pattern maintenance* (AGIL). Selanjutnya Soekanto (2006) batasan institusi sosial sebagai himpunan norma-norma kehidupan masyarakat dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok. Menurut Koentjaraningrat (1990) pranata sosial adalah adanya unsur-unsur yang mengatur perilaku masyarakat berupa sistem tata kelakuan dan hubungan sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup.

Orang-orang yang menduduki lembaga sosial sebagai pelaksana fungsi, dengan demikian mereka bisa diganti oleh orang lain tanpa mengganggu keberadaan dan kelestarian lembaga sosial

itu. Yang menjadi unsur-unsur dalam lembaga sosial bukanlah orangnya, melainkan kedudukan-kedudukan yang ditempati oleh individu orang beserta aturan tingkah laku wadah organisasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga sosial merupakan bangunan dari seperangkat peran dan aturan-aturan tingkah laku orang-orang dalam wadah organisasi tersebut secara terorganisir. Aturan tingkah laku yang sudah menjadi komitmen bersama dalam kehidupan wadah organisasi tersebut sering disebut sebagai norma-norma sosial. Adapun kelembagaan desa di pedesaan antara lain Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Koperasi Unit Desa (KUD), dan lain-lain (Dura, 2016).

Berdasarkan pengertian tentang lembaga sosial yang dikemukakan ahli-ahli di atas dapat dikemukakan bahwa lembaga sosial merupakan seperangkat norma dan nilai yang membentuk institusi sedemikian sehingga dapat mengatur kehidupan manusia dalam hubungan sosial agar mampu bertahan atau bahkan agar lebih baik dari kondisi kehidupan sebelumnya. Intinya penguatan kelembagaan desa merupakan upaya meningkatkan kapasitas dan pematapan tentang lembaga-lembaga desa yang meliputi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Kerjasama antar Desa, dan P3A Mitra Cai. Penguatan kelembagaan desa sebagai perekat hubungan sosial antara kelembagaan desa yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, yang dapat digambarkan sebagai berikut.

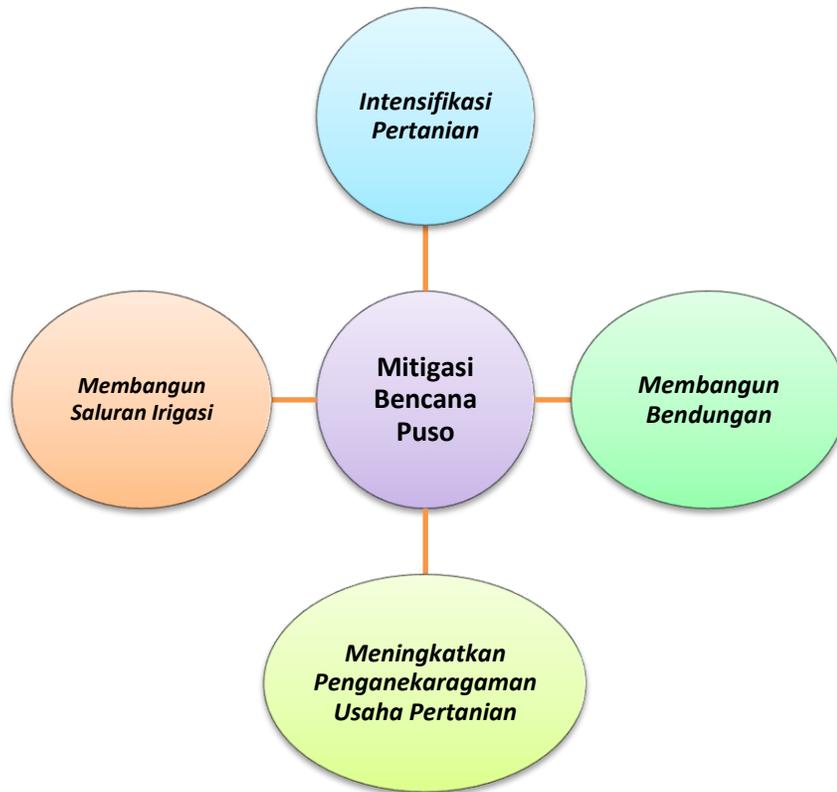


Gambar 1. Penguatan Kelembagaan Desa

2. Mitigasi Bencana Puso

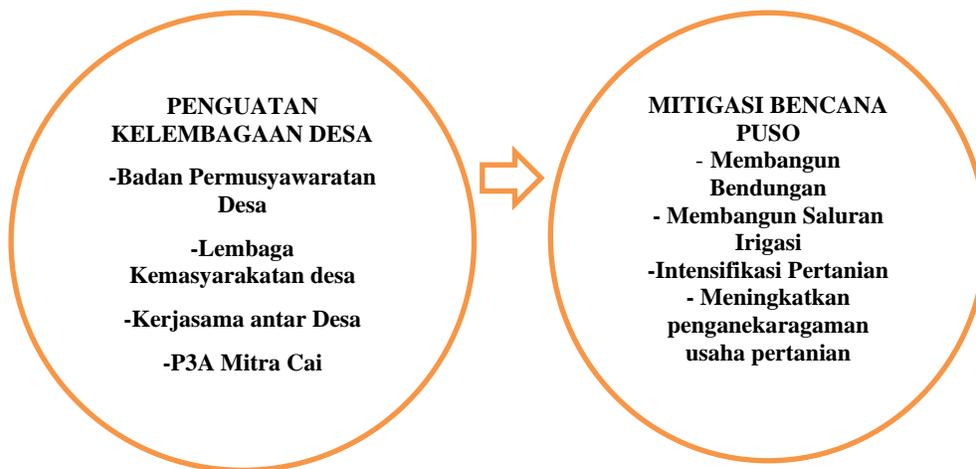
Inti dari mitigasi bencana puso adalah upaya mencegah dan menanggulangi bencana puso yang dilakukan oleh masyarakat petani bersama lembaga-lembaga desa, dan instansi yang terkait dengan membangun bendungan, membangun saluran irigasi, melakukan intensifikasi pertanian, serta penganeekaragaman usaha pertanian (Sudirah, 2019). Mitigasi bencana puso yang dilakukan dengan

penguatan kelembagaan desa, dan partisipasi masyarakat mampu mengatasi dan menanggulangi kegagalan panen para petani di desa Soge, Kertawinangun, dan Ilir kabupaten Indramayu, yang dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2. Mitigasi Bencana Puso

Keterkaitan penguatan kelembagaan desa dan mitigasi bencana puso dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. Penguatan Kelembagaan Desa dan Mitigasi Bencana Puso

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilakukan di desa Kertawinangun, Soge, dan Ilir kecamatan Kandanghaur, kabupaten Indramayu, Jawa Barat, tahun 2018. Aspek-aspek yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah penguatan kelembagaan desa dan mitigasi bencana puso banjir. Adapun fokus kajian yang berkenaan dengan aspek-aspek penguatan kelembagaan desa adalah Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kerjasama antarDesa, dan P3A Mitra Cai, sedangkan aspek-aspek kajian yang berkenaan dengan mitigasi bencana puso dan banjir adalah pembangunan bendung, pembangunan saluran irigasi, intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, dan peningkatan penganeekaragaman usaha pertanian. Seluruh fokus kajian tersebut dikaji berdasarkan data dan informasi yang diperoleh.

Metode penelitian ini adalah kualitatif. Metode ini dipilih untuk memperoleh data kualitatif yang lebih mendalam tentang aspek-aspek penguatan kelembagaan desa, dan upaya-upaya penanggulangan dan ancaman mitigasi bencana puso dan banjir pada masyarakat petani. Peneliti menggali data dan informasi melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Melalui observasi peneliti melakukan pengamatan terhadap daerah aliran Kali Perawan, kondisi air Kali Perawan, saluran irigasi, lahan persawahan, lahan pertambakan, lahan pembuatan garam, kondisi Bendung Karet.

Wawancara mendalam dilakukan dengan segenap informan, seperti petani, pengurus Kontak Tani, Kepala Desa, perangkat desa, petugas Lembaga Kemasyarakatan Desa, pengurus P3A Mitra Cai, pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan sebagainya. Pemilihan informan dilakukan secara random purposif. Wawancara dilakukan tidak hanya secara langsung, tetapi juga dilakukan melalui telepon. Peneliti juga menggali dokumen untuk mendapatkan berbagai data dan informasi yang terkait dengan aspek-aspek kajian tersebut.

Selain itu, pengambilan data dilakukan melalui *Fokus Group Discussion* (FGD), yaitu melalui panel antara peneliti dengan para narasumber (Petani, pengurus kontak tani, perangkat desa, petugas Lembaga Permusyawaratan Desa, petugas pengairan, dan pengurus LSM). Setelah presentasi dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi untuk mengkaji aspek-aspek penguatan kelembagaan desa dan mitiigasi bencana puso.

Analisis data menggunakan triangulasi. Dalam analisis triangulasi peneliti melakukan verifikasi hal-hal yang berkenaan dengan data dan informasi, teori, metode, dan pendapat antar peneliti. Pada triangulasi data dan informasi, peneliti melakukan klasifikasi data menjadi data primer dan data sekunder, data kuantitatif dan data kualitatif. Konfirmasi data dilakukan dengan meminta pendapat informan kembali. Konfirmasi dengan informan dilakukan dengan meminta pendapat informan lainnya tentang hal yang sama sebagai pembanding sehingga menjadi lebih jelas tentang data tersebut.

Analisis triangulasi selanjutnya peneliti membandingkan konsep ataupun teori yang menjadi rujukan dengan fakta-fakta di lapangan. Membandingkan konsep ataupun teori dengan fakta dilakukan untuk melihat konsistensi antara konsep ataupun teori dengan fakta di lapangan. Dari hasil analisis triangulasi konsep/teori yang digunakan dapat mengkonfirmasi tentang fakta-fakta di lapangan, dan teori-teori yang menjadi rujukan. Menurut hasil analisis triangulasi, teori-teori yang menjadi rujukan mampu menjelaskan fakta-fakta di lapangan.

Selanjutnya, peneliti melakukan analisis triangulasi yang berkenaan dengan metode penelitian yang digunakan. Hasil triangulasi menunjukkan bahwa metode kualitatif yang digunakan sudah tepat sebagai pendekatan untuk menjelaskan fenomena permasalahan penelitian ini. Terakhir adalah

triangulasi yang berkenaan dengan pendapat antar peneliti lain. Hal ini dilakukan tidak hanya dengan peneliti sejawat, tetapi juga dengan peneliti bidang lain yang relevan. Berdasarkan hasil triangulasi ini, peneliti memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang kondisi ataupun fenomena di lapangan. Sebelum mengambil kesimpulan, peneliti melakukan konfirmasi temuan penelitian di lapangan ke sejumlah narasumber. Penarikan kesimpulan baru dilakukan setelah melalui serangkaian analisis triangulasi tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelembagaan desa perlu penguatan. Penguatan kelembagaan desa dapat mendorong upaya-upaya mencegah dan menanggulangi mitigasi bencana puso. Karena itu, hasil dan pembahasan akan difokuskan pada penguatan kelembagaan desa pada masyarakat petani padi sawah dan mitigasi bencana puso.

1. Penguatan Kelembagaan Desa pada Masyarakat Petani Padi Sawah

Penguatan kelembagaan desa pada masyarakat padi sawah dilakukan dengan meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan koordinasi kelembagaan desa. Peran Kepala Desa dalam hal ini sangat penting untuk menggerakkan segenap kelembagaan desa untuk berkiprah sesuai dengan perannya masing-masing untuk mengatasi bencana puso dan banjir.

a) Pemantapan Kapasitas Kelembagaan Desa

Pemantapan kapasitas dilakukan dengan mendudukan kembali peran, dan tugas-tugas dari masing-masing lembaga desa, terkait dengan mitigasi bencana puso. Kepala Desa mempunyai peran penting dalam upaya pemantapan kapasitas kelembagaan desa ini. Kepala Desa sepatutnya mendorong dan menggerakkan lembaga-lembaga desa ini untuk berperan dan melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana mestinya. Lembaga-lembaga lain yang secara struktural membawahi kelembagaan desa ini juga mendorong dan menggerakkan lembaga-lembaga desa tersebut, sedemikian sehingga secara sinergi kelembagaan desa mampu mengatasi mitigasi bencana puso yang dialami masyarakat petani padi sawah di daerah ini.

Karena itu lembaga-lembaga desa bersama masyarakat petani harus memiliki pemahaman bertani padi sawah, seluk beluk usaha tani, pelestarian warisan budaya bercocok tanam, pengembangan usaha pertanian, penganekaragaman usaha tani, dan sebagainya. Penguatan kelembagaan sosial tersebut dapat dilakukan melalui penyuluhan, pendampingan, bimbingan masyarakat, sosialisasi, dan sebagainya oleh instansi ataupun lembaga sosial terkait dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat setempat, secara formal maupun informal.

b) Pemantapan Kapabilitas Kelembagaan Desa

Pemantapan kapabilitas kelembagaan desa ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dari lembaga-lembaga desa terkait dengan peran dan tugas-tugasnya terkait dengan mitigasi bencana puso. Sosialisasi dan penyuluhan yang berkenaan dengan usaha pertanian, khususnya bercocok tanam padi dan palawija sudah diwariskan orang tua dari generasi ke generasi. Sistem bercocok tanam padi yang demikian sudah menjadi budaya masyarakat agraris di ketiga desa tersebut. Sistem pertanian bercocok tanam padi sawah yang demikian dibangun dan dikerjakan secara bergotong royong dengan melibatkan segenap anggota masyarakat. Melalui penyuluhan dan kegiatan serupa

lainnya masyarakat petani padi sawah memahami dan menghayati nilai-nilai bercocok tanam padi, palawija, dan usaha pertanian lainnya untuk diimplementasikan dalam berusaha dan bekerja di lingkungan sosial masyarakatnya (Pranadji, 2006).

Penguatan modal sosial difasilitasi, dan dipandu Kepala Desa untuk urun rembuk antara para petani dengan kelembagaan desa lainnya untuk mendorong terwujudnya pembangunan Bendung Karet. Kepala Desa juga berkoordinasi dengan P3A Mitra Cai untuk berpartisipasi aktif mengawal dan mendistribusikan sistem pengairan irigasi dari Bendung Karet Kali Perawan ke lahan sawah petani di desa-desa tersebut.

c) Pemantapan Koordinasi Kelembagaan Desa

Pemantapan kelembagaan desa dilakukan dengan mendudukan peran kelembagaan desa tersebut secara optimal. Kelembagaan desa sepatutnya menjadi wadah dan penggerak dalam usaha-usaha pertanian bagi masyarakat padi sawah di wilayah yang bersangkutan. Selain itu, koordinasi merupakan hal penting yang sepatutnya diupayakan oleh kelembagaan desa ini untuk mempersatukan, mempertemukan para petani dengan segenap pihak yang terkait untuk mencapai tujuan bersama.

Peran Kepala Desa dalam hal ini sangat penting untuk menggerakkan peran kelembagaan desa yang bersama segenap masyarakat petani mencari solusi untuk memecahkan permasalahan puso dan banjir yang kerap dialami masyarakat petani padi sawah. Pemantapan dan koordinasi kelembagaan desa ini dilakukan melalui urun rembuk dengan segenap pihak yang terkait dengan mitigasi bencana puso mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapinya. Beberapa kali pertemuan antara Kepala Desa bersama para petani, pengurus kontak tani, perangkat desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, pengurus P3A Mitra Cai, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lain-lain digelar untuk menyatukan pemikiran dan tindakan untuk mengatasi bencana puso dan banjir tersebut. Akhirnya disepakati bahwa membangun bendung kali perawan, bersama saluran irigasinya merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi bencana puso dan banjir yang dialami masyarakat petani di daerahnya.

Kerjasama yang demikian terjalin melalui suatu jaringan kerjasama yang baik. Dalam hal ini penting untuk membangun saling kepercayaan sesama para petani, maupun dengan pihak pemerintah (Dinas Pertanian). Semua itu menjadi perekat hubungan sosial masyarakat petani. Penguatan kelembagaan desa tersebut dibangun melalui kerjasama dengan instansi yang terkait. Sejak pemerintahan Orde Baru, sistem pertanian di wilayah Indramayu terus mengalami kemajuan. Sejumlah bendung dibangun, dan sistem irigasi ditata. Hasilnya sejak tahun 2010 kabupaten Indramayu menyusul kabupaten Kerawang sebagai daerah lumbung padi bagi Jawa Barat. Dari data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik Jawa Barat, produksi padi yang dihasilkan petani Indramayu sejak tahun 2010 hingga tahun 2015 sekitar 1,2 hingga 1,4 juta ton per tahun. Kemudian pada tahun 2018 produksi padi di Indramayu meningkat sekitar 1,4 juta ton per tahun (BPS Jawa Barat, 2018).

d) Pemantapan Lembaga Pengairan

Lembaga pengairan yang terkait dengan pertanian padi di kawasan Bendung Kali Perawan adalah Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai. Lembaga pengairan ini adalah wadah untuk menampung kepentingan dan kegiatan petani secara bersama dalam mengelola air irigasi untuk usaha tani. P3A Mitra Cai dibentuk oleh dan atau untuk petani pemakai air pada daerah irigasi

berdasarkan kesadaran dan kepentingan bersama masyarakat petani. Anggota P3A Mitra Cai adalah para petani yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan tugasnya P3A Mitra Cai dibantu oleh Ulu-ulu sebagai pelaksana teknis sehari-hari dalam pengelolaan air irigasi di wilayah kerjanya. Petugas Ulu-ulu mengawal dan mendistribusikan sistem pengairan dari saluran irigasi ke sawah-sawah para petani (Perda DT II Indramayu No.17/1995 tentang P3A Mitra Cai).

Kondisi kelembagaan pengairan yang ada secara periodik sepatutnya ditingkatkan kemampuannya, karena itu perlu penguatan. Penguatan kelembagaan pengairan seperti P3A Mitra Cai dilakukan melalui pemberdayaan sumber daya para anggotanya. Dalam hal ini pemberdayaan P3A Mitra Cai mencakup aksesibilitas informasi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan peningkatan kapasitas anggota (Sudirah, 2016). Aksesibilitas informasi adalah faktor-faktor yang mendukung kemudahan akses informasi bagi petani padi, dan anggota P3A Mitra Cai untuk meningkatkan wawasan intelektualnya. Dengan demikian, mereka memahami kondisi usaha pertaniannya, dapat memilih bibit yang baik, pupuk yang berkualitas, dapat mengembangkan pemasaran produk pertaniannya, dapat mengembangkan usaha, dan sebagainya. Intinya, petani padi perlu memiliki wawasan intelektual untuk kemajuan dan pengembangan usaha pertaniannya.

Partisipasi masyarakat merupakan bentuk pelibatan berbagai sumber daya masyarakat untuk meningkatkan kapasitas diri yang diperlukan oleh petani padi. Kapasitas diri dapat dilakukan melalui pemantapan aturan sosial dengan melibatkan segenap sumber daya manusia yang ada di masyarakat. Dengan demikian, penguatan kelembagaan pengairan sepatutnya melibatkan SDM yang ada di masyarakat sehingga para petani padi lebih berdaya dalam usaha maupun bekerja.

Akuntabilitas memiliki berbagai pengertian. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggung gugatan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam konteks penguatan kelembagaan pengairan, akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban petani padi untuk secara bersama-sama SDM yang ada di masyarakat mengambil peran tanggung jawab terhadap peningkatan kapasitas diri petani padi. Peningkatan kapasitas dapat dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan yang berkenaan dengan seluk beluk pertanian padi. Dengan demikian, para petani padi lebih berdaya dalam berusaha dan bekerja.

Penguatan kelembagaan pengairan pertanian memerlukan kelembagaan lokal yang handal. Dalam hal ini, selain P3A Mitra Cai, kelembagaan lokal lainnya seperti, koperasi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) diharapkan memainkan peran penting dalam pengembangan kapasitas diri petani padi. Pelibatan kelembagaan lokal tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dan keterampilan yang diperlukan dalam usaha maupun bekerja. Intinya kapasitas kelembagaan pengairan diharapkan mampu mengawal dan mendistribusikan sistem irigasi pengairan untuk kebutuhan para petani padi menjadi lebih maju dan berkembang usahanya.

2. Mitigasi Bencana Puso

Mitigasi bencana puso merupakan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana puso yang dilakukan oleh lembaga-lembaga desa, masyarakat, dan instansi yang terkait sehingga memberikan solusi terhadap permasalahan bencana puso tersebut. Kawasan permukiman dan lahan pertanian di desa Kertawinangun Soge Ilir, dan Eretan, Pantai Utara Kabupaten Indramayu, Jawa Barat kerap mengalami banjir pada musim hujan. Selain itu, banjir di kawasan ini juga akibat pasang-surut air laut. Air laut masuk ke daerah hulu dari hilir kali Perawan di Eretan, bahkan akibat pasang-surut air laut ini dapat menimbulkan intrusi air laut sehingga air tawar yang bersumber dari hulu Kali Perawan tersebut bercampur dengan air laut yang asin sehingga menjadi payau. Akibatnya air sungai

tidak layak untuk sumber air baku maupun untuk mengairi lahan persawahan. Selain banjir, kawasan ini juga mengalami kekeringan pada musim kemarau. Akibatnya petani padi sawah di kawasan ini mengalami gagal panen (puso).

Masyarakat bersama pemerintah daerah mengupayakan untuk mengatasi masalah pengairan untuk lahan pertanian tersebut. Setidaknya ada 4 (empat) upaya yang dilakukan oleh masyarakat bersama instansi terkait dalam mengatasi mitigasi bencana puso tersebut, yaitu (a) membangun bendung karet kali perawan, (b) membangun saluran irigasi ke persawahan, dan (c) intensifikasi pertanian, dan (d) difersifikasi pertanian. Keterkaitan penguatan modal sosial dan mitigasi bencana banjir dapat digambarkan sebagai berikut:

a) Membangun Bendung Karet Kali Perawan dan Sistem Irigasi

Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat petani di tiga desa Soge, Kertawinangun, dan Ilir kecamatan Kandanghaur kabupaten Indramayu adalah kesulitan air untuk pertanian padi sawah. Sistem pertanian yang baik sepatutnya memiliki ketersediaan sumber air yang baik pula. Ketersediaan air dapat dipenuhi dengan cara membangun bendung kali yang ada. Karena itu masyarakat petani di ketiga desa tersebut mendorong pemerintah daerah untuk membangun bendung kali Perawan. Masyarakat petani tersebut melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengusulkan kepada Kepala Desa (Kuwu) untuk membangun bendung karet untuk mengatasi permasalahan kesulitan air untuk pertanian padi tersebut. Kepala Desa kemudian melakukan koordinasi dengan Camat Kandanghaur selaku atasannya. Aspirasi masyarakat di tiga desa tersebut oleh Kepala Desa selanjutnya diteruskan kepada Wakil Rakyat di tingkat DPRD dan DPR Pusat. Usaha dan perjuangan yang panjang yang dilakukan masyarakat bersama Kepala Desa, para Wakil Rakyat, akhirnya membuahkan hasil. Pembangunan Bendung Karet Kali Perawan dapat terwujud.

Bendung Karet diresmikan Presiden Jokowi pada 9 November 2018. Pembangunan Bendung Karet dikerjakan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Ditjen Sumber Daya Air. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa pembangunan bendung karet seperti ini merupakan salah satu cara yang cukup efektif dan efisien untuk pengelolaan air tawar untuk pertanian padi sawah. "Pembangunan Bendung Karet Kali Perawan tidak membutuhkan pembebasan lahan karena menggunakan badan Kali Perawan itu sendiri. Desain dan konstruksi Bendung Karet Kali Perawan lebih sederhana dibanding pembangunan bendungan pada umumnya. Biaya untuk membangun Bendung Karet Kali Perawan lebih kecil bila dibanding dengan membangun bendungan serupa pada umumnya. Bendungan Karet Kali perawan menghabiskan biaya sebesar Rp 67,4 miliar," (siaran pers saat peresmian Bendungan Karet Kali Perawan 9 November 2018).

Pembangunan bendung karet kali perawan ini juga dilengkapi dengan pembangunan sistem irigasi pengairan ke lahan sawah di ketiga desa tersebut. Kini kondisi pertanian padi sawah di lapangan adalah tidak lagi terkena banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau. Menurut Prabowo (2018) Bendung Karet Kali Perawan mampu mengatasi risiko banjir di 3 (tiga) desa seluas 380 ha, yakni Desa Soge, Kertawinangun, dan Ilir, kecamatan Kandanghaur, kabupaten Indramayu.

b) Menerapkan Intensifikasi Pertanian Padi Sawah

Pembangunan Bendung Kali Perawan yang berlokasi di desa Soge ini mampu mengembangkan musim tanam dan sistem pertanian di desa Soge, Kertawinangun dan Ilir, Kini musim tanam di ketiga

desa tersebut dapat dilakukan 2 kali setahun, yaitu musim *rendeng* dan musim *sadon*, dengan tingkat produktivitas rata-rata sekitar 7 sampai 8 ton per hektar per musim tanam. Sebelumnya lahan sawah di ketiga desa tersebut hanya dapat dilakukan 1 kali pada musim *rendeng* per tahun.

Pengembangan sistem pertanian di ketiga desa tersebut dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Intensifikasi pertanian dilakukan dengan mengoptimalkan pengolahan lahan sawah yang ada dengan menerapkan panca usaha tani, yaitu pengolahan tanah yang baik, irigasi pengairan yang teratur, pemilihan bibit padi unggul, pemupukan yang tepat waktu, dan pemberantasan hama dan penyakit tanaman secara efektif. Pengolahan tanah dilakukan menggunakan traktor sampai lahan sawah itu siap untuk ditanami padi. Sistem pengairan irigasi dibuat dan dialirkan ke sawah-sawah para petani secara teratur. Pemilihan bibit padi unggul dilakukan untuk mendapatkan bibit padi yang lebih produktif, dengan masa waktu yang tidak terlalu lama. Pemupukan dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan waktu pemupukan padi yang tepat. Pemberantasan hama dan penyakit dilakukan begitu terlihat gejala-gejala adanya hama dan penyakit tanaman padi, sejak penyemaian sampai dengan menjelang panen.

c) Meningkatkan Penganekaragaman Usaha Pertanian

Pada umumnya musim tanam usaha pertanian di daerah ini terdiri atas tiga musim, yaitu musim *rendeng*, *sadon*, dan palawija. Pada musim palawija para petani melakukan penganekaragaman usaha pertanian. Jenis palawija yang mereka tanam adalah bonteng (sejenis timun dengan ukuran yang lebih besar dan panjang), waluh (sejenis labuh bulat dengan ukuran yang lebih besar), kukuk (sejenis waluh dengan ukuran yang lebih panjang), kacang tanah, kacang panjang, pare, semangka, jagung, dan lainnya.

Selain usaha palawija, para petani di daerah ini juga melakukan usaha tambak ikan. Mereka membuat tambak-tambak, seperti tambak ikan lele, gurame, dan sebagainya yang lahan sawahnya berdekatan dengan sumber air irigasi. Bahkan sejumlah petani memanfaatkan lahan tersebut untuk usaha pembuatan garam, terutama pada musim kemarau. Pada musim kemarau air laut berbalik arah menuju perbatasan Bendung Karet Kali Perawan. Air laut ini selanjutnya dimanfaatkan para petani untuk pembuatan garam. Kini petani melalui penganekaragaman usaha pertanian dapat lebih meningkat lagi tingkat kesejahteraannya.

Simpulan

Penguatan kelembagaan desa dilakukan dengan pemantapan kapasitas, kapabilitas, dan koordinasi kelembagaan desa. Pemantapan kapasitas dan kapabilitas dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, magang, partisipasi dalam berbagai forum ilmiah, penyuluhan. Pemantapan koordinasi dilakukan dengan meningkatkan peran Kepala desa. Kepala Desa dalam hal ini sangat berperan untuk menggerakkan kelembagaan desa tersebut, dengan melibatkan partisipasi aktif segenap komponen masyarakat. Kelembagaan desa, dalam hal ini adalah Lembaga Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kerjasama antara Desa, dan P3 A Mitra Cai harus berperan aktif.

Mitigasi bencana puso dan banjir melalui pembangunan Bendung Karet Kali Perawan mampu mengatasi bencana banjir pada musim hujan, kekeringan pada musim kemarau, dengan menampung debit air sungai di bendung tersebut. Selain itu, Pembangunan Saluran irigasi mampu mendistribusikan sistem pengairan irigasi dari Bendung Kali Perawan ke seluruh persawahan di desa Soge, Kertawangunan, dan Ilir, sehingga petani dapat melaksanakan tanam padi dua sampai tiga kali dalam satu tahun. Pembangunan Bendung Karet Kali Perawan beserta sistem irigasinya mampu

meningkatkan pertanian padi sawah, dan penganekaragaman usaha pertanian yang meliputi usaha palawija, pertambakan ikan, dan pembuatan garam.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik (BPS). (2018). *Jawa Barat dalam Angka 2018*.

Dura, J. (2016). *Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)*. Diakses pada tanggal diakses 3 Sep 2019 di <https://lp2m.asia.ac.id/Wp-Content/Uploads/2018/04/4.-JURNAL-JUSTITA-DURA-JIBEKA-VOL-10-NO-1-AGUSTUS-2016.pdf>.

Horton, P. B., & Chester L. H. (1999). *Sosiologi*; Edisi Keenam Jilid I. Jakarta: Erlangga.

Koentjaraningrat. (1990). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Perda DT II Indramayu No.17/1995 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai di Kab. DT II Indramayu.

Prabowo, D. (2018). Minimalisasi Banjir Indramayu Pemerintah Kebut Proyek Bendung Karet. Diakses pada tanggal 12 November 2018 di <https://properti.kompas.com/read/2018/11/12/220000821/minimalisasi-banjir-indramayu-pemerintah-kebut-proyek-bendung-karet>.

Pranadji, T. (2006). Penguatan Modal Sosial untuk Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan dalam Pengelolaan Agroekosistem Lahan Kering: Studi Kasus di Desa-desa (Hulu DAS) Ex Proyek Bangun Desa, Kab Gunungkidul dan Ex Proyek Pertanian Lahan Kering, Kab. Boyolali. *Jurnal Agro Ekonomi*. 24 (2):178-208.

Ritzer, G. (2012), *Teori Sosiologi Modern*, terjemahan Alimandan, Jakarta: Kencana Prana Media Group. 121.

Soekanto, S.(1986). *Sosiologi, Suatu Pengantar*.

Sudirah. (2016). Makalah: Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata di Era Globalisasi. Seminar dan Simposium Nasional APSSI di Makasar 29-30 September 2016.

Sudirah. (2019). Makalah: Penguatan Modal Sosial Dan Mitigasi Bencana Puso. Konferensi Nasional Sosiologi VIII di Medan 2019, 31 Maret - 2 April 2019.